

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Mekanisme pertukaran sosial yang berlangsung di kawasan PT Parahyangan Golf Bandung masih belum berjalan secara optimal. Pertukaran manfaat cenderung timpang karena akses terhadap sumber daya, peluang kerja, dan proses pengambilan keputusan lebih banyak dikuasai pihak industri. Masyarakat hanya memperoleh keuntungan ekonomi bersifat informal, seperti pekerjaan harian atau kesempatan berdagang yang terbatas. Kurangnya transparansi, komunikasi yang belum intensif, dan minimnya kepercayaan kedua belah pihak membuat kolaborasi sulit berkembang. Padahal, jika pertukaran sosial berlangsung secara adil dan seimbang, keterlibatan masyarakat akan meningkat dan efektivitas kolaborasi dapat terjaga dalam jangka panjang.

Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan akses masyarakat ke kawasan rekreasi eksklusif, rendahnya kapasitas dan literasi pariwisata, ketimpangan kekuasaan antara industri dan masyarakat, serta minimnya peran fasilitasi dari pemerintah daerah. Di sisi lain, faktor pendukung yang teridentifikasi adalah adanya program pemberdayaan masyarakat meskipun masih terbatas, potensi pasar produk lokal yang dapat diintegrasikan ke rantai nilai industri, dan daya tarik kawasan yang unik sehingga berpeluang untuk membangun model kolaborasi yang saling menguntungkan. Dengan meminimalkan hambatan dan memperkuat faktor pendukung, kolaborasi dapat berjalan lebih seimbang dan berkelanjutan.

Hasil analisis ANP menunjukkan bahwa ekonomi inklusif menjadi prioritas tertinggi dalam mendukung optimalisasi kolaborasi, diikuti oleh faktor kolaborasi dan pertukaran sosial, sementara peran pemerintah dan kepuasan masyarakat berada di prioritas terendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan ekonomi inklusif masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pemerataan manfaat dan representasi masyarakat. Dampak positif ekonomi inklusif sejauh ini baru dirasakan sebagian kecil masyarakat, sedangkan mayoritas belum terlibat secara signifikan. Jika prinsip ekonomi inklusif diintegrasikan ke dalam perencanaan industri melalui program pelatihan keterampilan, kemitraan usaha, dan akses pasar lokal, maka peluang peningkatan

kesejahteraan masyarakat akan lebih besar sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan rekreasi eksklusif.

5.2 Implikasi

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai teori pertukaran sosial dengan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam pertukaran dapat melemahkan kepercayaan sosial dan memperburuk konflik. Kolaborasi yang tidak memperhatikan dimensi keadilan sosial hanya akan memperkuat struktur kekuasaan yang timpang dan memperparah eksklusi di tingkat lokal. Dari sisi praktis, temuan ini dapat menjadi masukan strategis bagi pengelola kawasan pariwisata dan pemerintah daerah dalam merancang ulang model kolaborasi yang lebih adil, transparan, dan partisipatif. Program pemberdayaan masyarakat, skema kemitraan yang terbuka, serta pelibatan kelompok marginal seperti perempuan harus menjadi prioritas untuk menciptakan dampak yang lebih inklusif.

5.3 Rekomendasi

Bagi PT Parahyangan Golf Bandung, program pelatihan yang dapat dilakukan secara sistematis antara lain pelatihan perawatan lapangan golf (*turf management*) yang mencakup teknik pemotongan rumput, penyiraman, pemupukan, dan pemeliharaan area green sesuai standar internasional. Lalu pelatihan layanan perhotelan dan *food & beverage* yang meliputi keterampilan melayani tamu, menyajikan makanan dan minuman, serta menjaga kebersihan dapur.

Untuk pelatihan kewirausahaan berbasis produk lokal yang mengajarkan pengolahan makanan khas, pengemasan yang menarik, dan strategi pemasaran digital. Bisa juga diterapkan transformasi terkait peluang kerja berbasis kemitraan dengan melibatkan kelompok rentan seperti disabilitas yang memiliki skill untuk pengembangan kawasan wisata. Serta pelatihan bahasa Inggris dasar untuk pariwisata yang difokuskan pada komunikasi sederhana dengan wisatawan mancanegara.

Bagi pemerintah daerah, diperlukan peran yang lebih aktif sebagai fasilitator dan mediator hubungan antara industri dan masyarakat, misalnya melalui penyusunan

kebijakan kolaboratif berbasis partisipasi dan keadilan sosial, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata.